

RENCANA KERJA 2017



DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 sebagai acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 tidak terlepas dari Program/Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng serta mengacu pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Kab. Soppeng yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Penyusunan ini bermakna positif yang mengarah pada pembangunan ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan secara optimal, merata kepada kepentingan masyarakat, dan bermanfaat bagi upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belumlah sempurna seperti yang diharapkan, olehnya itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan untuk penyempurnaan Rencana Kerja di masa yang akan datang.

Besar harapan kami semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan serta penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Amin.

Watansoppeng,

2017



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 didasarkan kepada kaidaaalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016-2021, serta telah disesuaikan dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta Kementerian Pertanian RI; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan serta dengan memperhatikan kebutuhan setempat.

Dari Visi dan Misi ditentukan beberapa tujuan dan sasaran strategis yang menjadi dasar untuk penetapan program dan kegiatan-kegiatan prioritas dalam Penyelenggaraan Perikanan dan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017. **Memantapkan Arah Kebijakan Pertanian yang ProPetani dan Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan Sulawesi Selatan** Petani merupakan salah satu skala prioritas Visi Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015 yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas unggulan, peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan percepatan penganeekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian juga dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan daerah Kabupaten Soppeng secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangandan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan subsistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani yang mantap dan berkelanjutan.

Dalam kerangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan untuk menindaklanjuti Amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Soppeng. Dokumen RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta perkiraan anggaran. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan sumberdaya manusia pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan pembangunan jangka menengah nasional serta kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi dalam mewujudkan Visi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng yaitu ***“Terwujudnya Pemantapan Perikanan dan Ketahanan Pangan yang inovatif, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021”***

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Adapun **Misi** Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

- ❖ ***Mendorong Pengembangan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing***
- ❖ ***Mewujudkan Pemantapan Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan***
- ❖ ***Mewujudkan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal***
- ❖ ***Mewujudkan Sistem Distribusi dan Akses Pangan yang Stabil bagi Masyarakat***

B. Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng disusun berdasarkan peraturan

perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
22. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman PenyusunanPrograma Penyuluhan Pertanian;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian;
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ini disusun dengan **maksud**:

- a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng selama satu tahun ke depan;
- b) Sebagai penjabaran *implementatif* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 pada bidang Perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Soppeng;
- c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
- d). Memudahkan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kegiatan pada Tahun 2017;

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 **bertujuan** untuk :

- a) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b) Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan di bidang perikanan dan ketahanan pangan dalam memahami dan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN , berisikan :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan,
- 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya disahkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

- 2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Beirisikan kajian terhadap pedoman kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

BAB III.TUJUAN,SASARAN, PROGRAMDANKEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi,yakni yang mengarah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait Tupoksi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, didasarkan kepada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan programdan kegiatan,uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, dan Tabel Rencana Program dan Kegiatan.

BAB IV.PENUTUP,

Berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASIPELAKSANAAN RENJATAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerjadan Capaian Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng.

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2016

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 secara umum bertujuan untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia Pertanian yang meliputi para Penyuluh, para Pelaku Utama/Pelaku Usaha sector Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Pelaku Agribisnis) dalam melaksanakan Revitalisasi Penyuluhan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) dan Program Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan menuju Kemandirian Pangan dalam upaya pemenuhan ketersediaan pangan yang bermutu, aman, beragam, bergizi dan berimbang.

Untuk mencapai tujuan dimaksud dan dengan didukung oleh dana APBD Kabupaten, dana APBD Provinsi dan dana APBN, BP3KP Kabupaten Soppeng melaksanakan beberapa kegiatan berdasarkan skala prioritas. Mengingat keterbatasan anggaran yang ada, Program dan Kegiatan Tahun 2014 diarahkan pada kegiatan-kegiatan pokok prioritas dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng dan arah kebijakan pembangunan dari Kementerian Pertanian, dan didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta unit-unit organisasi penyuluhan dibawahnya. Keterbatasan anggaran pada Tahun 2014 menyebabkan beberapa kegiatan urgent tidak dapat dilaksanakan dan sebagian dilaksanakan dengan anggaran yang terbatas sehingga sasaran pelaksanaan program dan kegiatan tidak sepenuhnya dapat tercapai. Meskipun demikian, anggaran pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2014 telah menunjukkan kearah yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Memperhatikan cakupan permasalahan tersebut diatas, kebijakan pembangunan ketahanan pangandi Kabupaten Soppeng diarahkan guna

memperkuat seluruh subsistem dalam system ketahanan pangan, yang meliputi; subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.

Pada sisi ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Soppeng diarahkan untuk: (a) menjamin ketersediaan pangan; (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan masyarakat; dan (c) meningkatkan kapasitas produksi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan untuk produksi pangan.

Pada aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- (a) Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan, sehingga efisiensi perdagangan dapat ditingkatkan, termasuk didalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan akibat distribusi yang tidak efisien;
- (b) Mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta percepatan nilai tambah.

Dalam hal konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- (a) Menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang;
- (b) Semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dsb).

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2015 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp. **13,247,787,818,-** dengan realisasi sebesar Rp. **13,019,514,835,-** atau sekitar **98,28 %** yang terdiri Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung Tidak Langsung dengan nilai pagu dana keseluruhan setelah revisi atau perubahan anggaran sebesar Rp. **9,471,632,937,-** dengan realisasi sebanyak Rp. **9,267,614,262** atau sekitar **97,85 %**.
- b. Belanja Langsung dengan jumlah pagu dana setelah direvisi atau perubahan anggaran sebesar **Rp. 3,776,154,881,-** untuk membiayai 10 (sepuluh) Program

dan 42 (Empat Puluh Dua) Kegiatan dengan Realisasi sebesar Rp. **3,751,900,573,- atau sekitar 99,36 %**.

Adapun rencana dan realisasi belanja berdasarkan Program dan kegiatan Lingkup Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng tergambar pada Tabel berikut ini :

Tabel 3 : Realisasi Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2015

Kode		Uraian Menurut Program & Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Prog	Keg.				
01		Program Pelayanan Jasa Adm. Perkantoran	1,211,680,161	1,198,917,024	98,95
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik	52,138,500	47,407,483	90,93
	6	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11,810,506	6,029,950	51,06
	8	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	16,750,000	16,750,000	100
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,019,375	3,019,375	100
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,000,000	7,000,000	100
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,200,000	1,200,000	100
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya	893,169,650	893,037,766	99,99
	20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	215,275,250	213,673,700	99,26
	25	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	11,316,880	10,903,750	96,35
02		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	619,000,000	616,062,000	99,53
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	315,000,000	315,000,000	100
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	40,000,000	39,993,000	99,98
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	177,750,000	175,124,000	98,52
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55,000,000	54,745,000	99,54
	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	31,250,000	31,200,000	99,84

03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	52,125,000	52,123,610	100
	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	52,125,000	52,123,610	100
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000	29,999,799	100
	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30,000,000	30,000,000	100
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja	50,328,850	50,107,700	97.62
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar realisasi Kinerja Pegawai	16,248,500	10,736,250	99,92
	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11,510,350	11,492,600	99,85
	05	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	11,852,500	11,851,700	99,99
	06	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	10,717,500	10,528,550	98,24
15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	250,113,250	250,111,425	100
	01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	175,223,000	175,222,725	100
	02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	33,721,000	33,719,450	100
	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	41,169,250	41,169,250	100
16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	566,142,520	562,989,190	99,44
	01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	58,022,500	58,017,500	99,99
	03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	82,440,000	82,284,400	99,81
	04	Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan	21,607,500	21,607,150	100
	05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	39,026,250	38,900,900	99,68
	09	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	27,073,400	27,072,900	100
	10	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	9,493,750	9,493,550	100
	13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	66,000,000	65,997,740	100
	14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	8,237,500	8,187,350	99,39

	18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK)	200,922,120	198,800,000	98,94
	19	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	9,120,000	9,120,000	100
	22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	33,704,500	33,026,000	97,99
	31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10,495,000	10,481,700	99,87
18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	47,773,100	47,772,800	100
	04	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	47,773,100	47,772,800	100
19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	51,089,200	51,089,200	100
	01	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	51,089,200	51,089,200	100
20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	897,902,800	893,545,775	99,51
	01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	39,374,800	37,273,875	94,66
	02	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	73,516,500	71,916,100	97,82
	03	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	32,978,000	32,977,900	100
	05	Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluhan Kecamatan	51,382,500	51,382,500	100
	07	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluhan	571,051,000	570,971,400	100
	08	Pengembangan Jaringan Cyber Extension	129,600,000	129,024,000	100

Sumber : Data LRA BP3KP Kab. Soppeng Tahun 2015

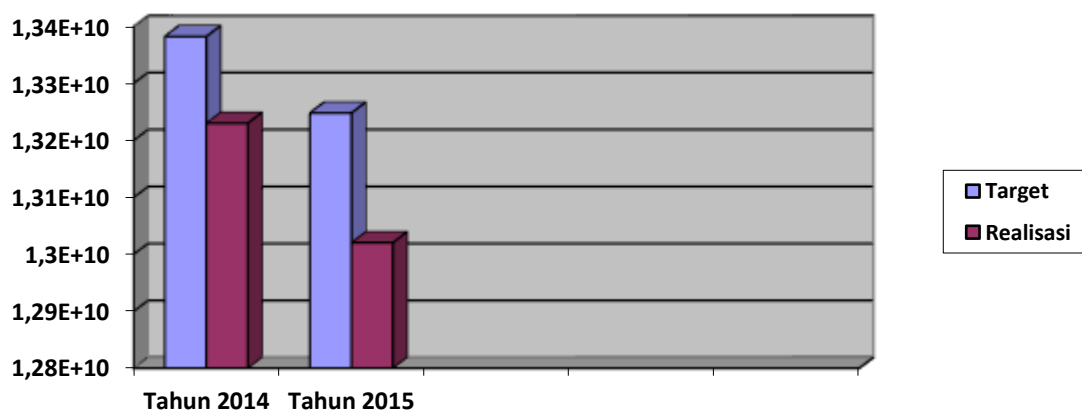
Sedangkan untuk mengetahui Realisasi Belanja Langsung berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5 : Jenis Belanja Langsung dan Jumlah Anggarannya T.A 2015

No.	Jenis Belanja Langsung	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	223,275,000,-	218,675,000,-
2	Belanja Barang dan Jasa	2,128,156,761,-	2,114,731,123,-
3	Belanja Modal	1,424,723,120,-	1,419,312,400,-
	Jumlah	3,776,154,881,-	3,752,718,523

Untuk mengetahui perbandingan peningkatan jumlah pagu anggaran dan realisasi belanja Tahun 2014 s/d Tahun 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1 : Perbandingan Jumlah Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014 s/d Tahun 2015



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pagu anggaran dan realisasi belanja pada Tahun 2014 jumlah anggaran sebesar Rp. 13,382,138,743 dan realisasi Rp. 13,229,878,154 atau tingkat pencapaian 98,86% Sedangkan pada Tahun 2015 pagu anggaran sebesar Rp. 13,247,787,818 dan realisasi 13,020,332,785 dan tingkat pencapaian 98,28 %. Adapun realisasi tingkat pencapaian program dan kegiatan untuk belanja langsung yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2015 telah dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Pencapaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** diwujudkan melalui 9 (sembilan) kegiatan berupa pagu anggaran sebesar **Rp. 1,211,680,161,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1,198,917,024,-** atau realisasi sekitar **98,38%** yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. **Penyediaan Jasa Komunikasi berupa Sumber Daya Listrik dan Telepon** berupa Tersedianya Jasa Komunikasi Fasilitas Jasa Sumber Daya Listrik dan Telepon selama 12 bulan yaitu Jasa Sumber Daya Listrik sebanyak 8 Unit masing-masing 1 (unit) pada 8 (delapan) BP3K. Sedangkan untuk Jasa Telekomunikasi berupa Jasa Langganan Telepon, Jasa Langganan Internet/Spedy dan Faxmile sebanyak 1 (unit) pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 52,138,500,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 47,407,483** atau **realisasi sekitar 90,93%.**

- b. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional** berupa Tersedianya Jasa Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng berupa Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sebanyak 1 unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebanyak 54 unit dimana realisasi pengurusan STNK sebanyak 41 unit atau sekitar 75%. Kendaraan Dinas tersebut merupakan asset BP3KP Kab. Soppeng berdasarkan Buku Inventaris dan Neraca Tahun 2015. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 11,810,506** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 6,029,950,- atau realisasi sekitar 51,06%**.
- c. **Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor berupa** Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor dan Peralatan Bahan Pembersih yang berupa Jasa Cleaning sebanyak 1 (satu) orang dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan sebanyak 8 jenis yaitu sapu ijuk, pengepel lantai, pembersih lantai, sabun cair, tempat sampah, penyegar udara, sapu lidi, gesek kaki. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 16,750,000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 16,750,000,- atau realisasi sekitar 100%**.
- d. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** berupa Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang memadai sebanyak 10 jenis berupa tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih seperti piring makan, asbak, keranjang plastik, piring ceper, penutup bosara, gelas minum, cerek minuman, gayung, sendok, pot bunga. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 3,019,375** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 3,019,375,- atau realisasi sekitar 100%**.
- e. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan** berupa Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar Harian/Mingguan/Bulanan sebanyak 7 media surat kabar harian, 2 media surat kabar mingguan dan surat kabar bulanan sebanyak 3 media selama 12 bulan sebagai wujud peningkatan akses informasi bagi aparat. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 7,000,000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 7,000,000,- atau realisasi sekitar 100%**.
- f. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa** Terpenuhnya Peralatan Rumah Tangga berupa Langganan Bahan Bakar Gas untuk Kantor selama 12 kali. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 1,200,000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1,200,000,- atau realisasi sekitar 100%**.

- g. **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah berupa** Terlaksananya koordinasi lintas sektoral/unit kerja dlm rangka penyelenggaraan pengawalan penyuluhan dan pemantapan kebijakan ketahanan pangan sebanyak 1500 kali selama 1 Tahun dan teralisasi sebanyak 1500 kali. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 893,169,650** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 893,037,766,- atau realisasi sekitar 99,99%**.
- h. **Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa** Tersedianya Jenis Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebanyak 16 Jenis selama 12 bulan berupa Belanja Pegawai sebanyak 9 jenis yaitu :
- Honorarium Pengguna Anggaran sebanyak 1 orang selama 12 bulan
 - Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebanyak 1 orang selama 12 bulan
 - Honorarium Bendahara Pengeluaran sebanyak 1 orang selama 12 bulan
 - Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran sebanyak 2 orang selama 12 bulan
 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 1 orang dengan 23 paket
 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebanyak 1 orang selama 12 bulan
 - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebanyak 3 orang sebanyak 23 paket
 - Honorarium Penyimpan Barang/Pengurus Barang sebanyak 2 orang selama 12 bulan
 - Honorarium Pengelola Aplikasi Komputer sebanyak 2 orang selama 12 bulan

Sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa terdapat 7 Jenis antara lain

- Belanja ATK selama 1 (satu) Tahun yang dialokasikan di BP3KP dan 8 BP3K Kecamatan
- Belanja Jasa Pramubakti berupa Jasa Sopir sebanyak 1 (satu) orang
- Belanja Cetak berupa Cetak Sertifikat Seminar Penyuluh sebanyak 600 (enam ratus) buah dan Cetak Stiker Barang sebanyak 500 (lima

ratus) buah.

- Belanja Fotocopy selama 1 (satu) tahun
- Belanja Jilid selama 1 (satu) tahun
- Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai selama 1 (satu) tahun
- Belanja Makan dan Minum Rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 215,275,250** dan realisasi belanja sebesar **Rp. 213,673,700,-** atau sekitar **99,26%**

- i. **Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa** Biaya Umum Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa antara lain Belanja ATK dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Lumbung Pangan. Adapun pagu belanja sebesar Rp. **1,200,000** dengan anggaran sebesar **Rp. 1,200,000,-** atau realisasi sekitar **100%**.

- 2) **Pencapaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 619,000,000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 616,062,000,-** atau realisasi sekitar **99,53%** dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional** berupa Tersedianya sarana penyuluhan berupa Kendaraan Dinas Operasional Penyuluhan berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Sport sebanyak 10 (sepuluh) unit. Pengadaan Kendaraan Dinas tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2015. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 315,000,000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 315,000,000,-** atau realisasi sekitar **100 %**
- b. **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor** berupa Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparat berupa Pengadaan Besi Pengaman sebanyak 1 paket dan Pengadaan Papan White Board sebanyak 8 (delapan) unit. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 40,000,000** dengan anggaran sebesar **Rp. 40,000,000,-** atau realisasi sekitar **100%**.
- c. **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor** berupa Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam rangka meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi perkantoran sebanyak 8 jenis berupa
- Pengadaan Mesin Ketik sebanyak 2 (dua) buah
 - Pengadaan Televisi sebanyak 2 (dua) buah
 - Pengadaan Komputer/PC sebanyak 4 (empat) buah

- Pengadaan Laptop sebanyak 4 (empat) buah
- Pengadaan Printer sebanyak 3 (tiga) buah
- Pengadaan Scanner sebanyak 1 (satu) buah
- Pengadaan UPS Stabiliser sebanyak 1 (satu) buah.
- Pengadaan Hardisk External sebanyak 2 (dua) buah
- Penganadaan Aplikasi Manajemen Aset sebanyak 1 (satu) paket

Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 177,750,000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 175,124,000,-** atau realisasi sekitar **98,52 %**.

- d. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional** berupa Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional dalam rangka meningkatnya umur teknis kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 1 unit. Pemeliharaan tersebut berupa Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Penyediaan Bahan Bakar Minyak. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 55,000,000,-** dengan anggaran sebesar **Rp. 54,745,000,-** atau realisasi sekitar **99,54%**.
- e. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor** berupa Terlaksananya pemeliharaan/perawatan peralatan gedung kantor sebanyak 4 jenis pemeliharaan yaitu AC, komputer/PC, laptop atau notebook dan printer. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 31,250,000** dengan anggaran sebesar **Rp. 31,200,000,-** atau realisasi sekitar **99,84%**.

3) Pencapaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 52,125,000** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 52,123,610** atau realisasi sebesar **100%** dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya berupa Belanja Pakaian Dinas Sipil Harian (PDH) beserta Atributnya sebanyak 139 orang dengan realisasi 139 orang. Adapun pagu anggaran sebesar Rp. 52,125,000 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 52,123,610 atau sekitar 100%

4) Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 30,000,000** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 29,999,799** atau realisasi sebesar **100 %** dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan berupa Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparat BP3KP Kab. Soppeng yang diikuti sebanyak 4 orang. Adapun realisasi belanja sebesar **Rp. 30,000,000** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 29,999,799** atau **realisasi sebesar 100 %**.

5) Pencapaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mencakup 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 50,255,600,-** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 51,479,100** atau **realisasi sebesar 97,62%** sebagai berikut :

- a. Penyusunan Lapaoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berupa Terpenuhiya Laporan Capaian Kinerja Organisasi Tepat Waktu yang berupa tersusunnya Dokumen RKA/DPA serta Dokumen LPPD, LKPJ dan LAKIP Tahun 2014. Adapun realisasi belanja sebesar **Rp. 14,242,800,-** dengan anggaran sebesar **Rp. 12,245,500,-** atau **realisasi sebesar 99,99%**.
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa Terpenuhiya Laporan SOP Tepat Waktu sebanyak 200 SOP. Adapun realisasi belanja sebesar **Rp. 9,946,700,-** dengan anggaran sebesar **Rp. 10,054,400,-** atau **realisasi sebesar 98,93%**.
- a. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa Terpenuhiya Laporan SPM Tepat Waktu sebanyak 7 indikator SPM. Adapun realisasi belanja sebesar **Rp. 26,066,100,-** dengan anggaran sebesar **Rp. 27,179,200,-** atau **realisasi sebesar 95,90%**

6) Pencapaian Program Peningkatkan Kesejahteraan Petani diwujudkan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 250,113,250,-** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 250,111,425,-** atau realisasi sebesar **100%** yang tingkat pencapaian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis** berupa pelatihan bagi Gapoktan/Poktan/Wanita Tani sebanyak 320 orang dari perwakilan kelompok tani yang dilaksanakan di 8 BP3K Kecamatan sebanyak masing-masing 40 orang per kecamatan selama 3 (hari) dengan 1 angkatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan sikap petani sebagai pelaku utama. Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 175,223,000,- dengan anggaran sebesar Rp. 175,222,725,- atau realisasi sekitar 100%.

- b. **Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis** berupa monitoring dan evaluasi pendampingan penyuluhan pengelolaan manajemen gapoktan yang dilaksanakan di 8 BP3K Kecamatan selama 2 (dua) kali .Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar **Rp.33,721,000,-** dengan anggaran sebesar **Rp. 33,719,450,-** atau realisasi sekitar 100%.
 - c. **Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani** berupa Penguatan kemampuan lembaga petani dalam hal ini penilaian kelas kelompok tani sebanyak 650 Poktan dari Kelompok Tani Pemula, Kelompok Tani Lanjut, Kelompok Tani Madya dan Kelompok Tani Utama, dimana penilaian dilakukan secara berjenjang mulai usulan dari desa/kel, tingkat BP3K kecamatan dan selanjutnya diverifikasi oleh Tim Penilai Kabupaten. Adapun realisasi belanja kegiatan ini sebesar **Rp. 41,169,250,-** dengan anggaran sebesar **Rp. 41,169,250,-** atau realisasi sekitar 100%.
- 7) Pencapaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan** yang diwujudkan melalui 12 (dua belas) kegiatan dengan pagu anggaran **sebesar Rp.566,142,520,-** dari pagu anggaran **sebesar Rp. 562,989,190,-** atau realisasi **sebesar 99,44%** dengan pencapaiannya dijabarkan sebagai berikut :
- a. **Penanganan Daerah Rawan Pangan** berupa Tersusunnya Peta Rawan Pangan sebanyak 8 (delapan) peta melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Kegiatan ini melalui Jasa Konsultansi pihak ketiga. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 58,022,500,-** dengan realisasi anggaran **sebesar Rp. 58,017,500,-** atau realisasi sebesar **99,99%**
 - b. **Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan** berupa Terlaksananya penyusunan Analisis Pola Konsumsi dan Suplai Pangan berupa Skor Pola Pangan Harapan dalam bentuk sebanyak 1 Dokumen sehingga dapat diketahui Pola Konsumsi Pangan Masyarakat melalui perhitungan Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan. Kegiatan ini difokuskan dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dengan melibatkan aparat penyuluh sebagai pengambil data dilapangan dan Staf Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menganalisa data tersebut dan mengkonversi menjadi NBM dan PPH. Skor Pola Pangan Harapan pada Tahun 2015 adalah 88,0 sedangkan target atau rencana tingkat capaian sebesar 90,00 sehingga tingkat pencapaian kegiatan tersebut sebesar 97,77 %. Sedangkan untuk Tahun 2014 Skor PPH adalah 84.9. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya peningkatan perubahan pola konsumsi pangan kita menuju pada pola konsumsi ideal dengan penurunan konsumsi beras minimal 1,5% per tahun. Adapun realisasi belanja **Rp. 82,440,000,-** dengan anggaran sebesar **Rp. 82,284,400,-** atau realisasi sekitar **99,81%**.

- c. Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan berupa Tersusunnya Laporan Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan terhadap Jumlah Penduduk.** Penyusunan analisis dilakukan dengan menghitung jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan terhadap jumlah penduduk dengan anggaran **sebesar Rp. 21,607,500,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 21,607,150** atau realisasi sekitar **100%**. Kegiatan tersebut meliputi analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan serta analisis ketersediaan kalori dan protein melalui Neraca Bahan Makanan. Pada tahun 2015 tingkat ketersediaan dan konsumsi 14 (empat belas) jenis pangan mengalami surplus dan defisit untuk beberapa jenis pangan tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7 :Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2014 dan Tahun 2015

No.	Jenis Pangan	Tersedia (Ton)		Kebutuhan (Ton)		+/-	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1.	Beras	156,871	130,182	25,697.60	25,830.08	130,386.40	93,891.92
2.	Jagung	7,381	8,193	311.09	313,09	7,079.51	7,879.91
3.	Ubi Kayu	511	125	2,226.21	1,031.36	(1,715.21)	(906.36)
4.	Ubi Jalar	36	108	503.87	506.47	(467.87)	(398.47)
5.	Kacang Tanah	1,107	427	100.77	101.29	1,006.23	325.71
6.	Kacang Hijau	506	130	338.97	340.72	167.03	(210.72)
7.	Kedelai	4,409	4,634	668.78	672.23	3,740.22	3,961.77
8.	Sayu-sayuran	367	367	13,274.80	13,343.24	(12,571.80)	(12,975.24)
9.	Buah-Buahan	1,623	43,521	14,236.74	14,310.14	(12,613.74)	29,210.86
10.	Daging	1,458	1,458	183.23	187.17	1,274.77	1,273.83
11.	Telur	3,806	4,086	3,114.86	3,130.92	691.14	955.08
12.	Ikan	3,324	1,313	12,578.54	12,643.39	(9,254.54)	(11,430.39)
13.	Gula Merah	299	299	137.42	138.13	161.58	160.87
14.	Gula Pasir	2,076	2,076	1,823.51	1,832.51	252.89	243.49

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 terjadi penurunan ketersediaan pangan jenis tertentu seperti beras, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedele, daging, telur dan gula merah dibandingkan pada Tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi jenis pangan akibat cuaca ekstrim sebagai faktor penghambat serta gangguan POPT. Disamping hal tersebut diatas ada beberapa jenis pangan tertentu juga mengalami peningkatan ketersediaan seperti buah-buahan, Telur, Daging dan Ikan yang disebabkan oleh tingkat produksi yang tinggi serta impor dari luar seperti telur, daging dan gula pasir.

Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan Tahun 2015 terdapat surplus pada jenis pangan beras, jagung, kacang tanah dan kacang kedelai sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Soppeng yang merupakan salah satu daerah penyanggah lumbung pangan nasional. Sedangkan terdapat defisit pada jenis pangan Umbi-umbian antara lain ubi kayu, ubi jalar, serta Sayur-sayuran dan Ikan dan Gula Pasir. Jenis pangan ini umumnya didatangkan dari luar kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan jenis pangan utama dalam hal ini beras mengalami penurunan sebesar 28,38 % dimana pada Tahun 2014 sebesar 156,084 Ton menjadi 130,182 Ton pada Tahun 2015.

- d. **Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah** berupa Tersedianya Laporan Berkala Ketahanan Pangan Daerah berupa laporan pelaksanaan Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten . Rapat DKP Tk. Kecamatan dilaksanakan di 8 BPK sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang yang terdiri dari Pengurus Dewan Ketahanan Pangan Tk. Desa/Kelurahan. Sedangkan Rapat DKP Tk. Kabupaten dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 70 orang yang berasal dari Pengurus DKP Tk. Desa/Kel dan DKP Tk. Kecamatan. Kegiatan ini menghasilkan Dokumen/Buku Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2015. Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar **Rp.39,026,250,-** dengan anggaran sebesar **Rp. 38,900,900,-** atau realisasi sekitar **99,68%**.
- e. **Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan** berupa Terlaksananya Pengembangan Tanaman Pekaranga ndalam rangka meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat serta diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan (P2KP) yang merupakan implementasi Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009, tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok wanita tani sebanyak 8 (delapan) kelompok sebagai wujud pemberdayaan dan pembinaan kelompok wanita tani melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan berupa Pemberian bahan/bibit pengembangan pekarangan serta pembinaan kelompok wanita tani penerima bantuan modal P2KP melalui Dana Tugas Pembantuan. Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan diversifikasi pangan yang berbasis sumber daya lokal. Adapun realisasi belanja kegiatan ini sebesar **Rp.27,073,400,-** dengan anggaran sebesar **Rp. 27,072,900,-** atau **realisasi sekitar 100%.**

- f. **Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat** berupa Tersusunnya laporan Akses dan Harga Pangan Tahun 2015 dimana mengalami peningkatan yang cukup baik dimana tingkat ketersediaan dan harga 9 (Sembilan) bahan pokok cukup tersedia dan terjangkau meliputi: (1) gabah/beras, (2) jagung, (3) kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah dan dapat terjangkau oleh masyarakat di 8 kecamatan. Untuk mengetahui lebih jelas situasi ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8 : Perbandingan Harga Pangan Strategis Tahun 2014 - 2015

No.	Jenis Komoditi Strategis	Harga Rata-Rata (Rp/Kg)	
		2014	2015
1	Beras	5,963	8,212
2	Jagung Pipilan	2,365	4,738
3	Kedelai	5,100	6,783
4	Daging Sapi	70,000	94,808
5	Daging Ayam	17,135	20,885
6	Telur Ayam Ras	14,904	16,923
7	Minyak Goreng	9,500	11,202
8	Gula Merah	11,019	11,692
9	Cabe Merah	11,048	21,481

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa adanya kenaikan harga semua pangan pokok pada tahun 2015 dibandingkan pada Tahun 2014 terutama

kenaikan harga yang signifikan yaitu beras, jagung, daging sapi dan cabe merah. Hal ini disebabkan akibat adanya kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen, adanya kenaikan BBM, adanya inflasi serta adanya jumlah permintaan pasar tidak berbanding dengan ketersediaan produksi

g. **Pengembangan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah** berupa Pengisian Gudang Cadangan Pangan Daerah di Desa Enrekeng Kec. Ganra sebanyak 10 Ton, akan tetapi yang terealisasi sekitar 6,63 Ton atau realisasi sekitar 66.3%. Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan Harga Beras Medium sehingga target pengisian sebesar 10 ton disesuaikan dengan jumlah pagu anggaran dan Harga Beras Medium di pasaran turun menjadi 6,63 ton. Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 66,000,000 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 65,997,740 atau realisasi keuangan sebesar 100%

h. **Pengembangan Desa Mandiri Pangan** berupa Terlaksananya Pembinaan Kelompok Afinitas di Desa Mandiri Panganyang terdapat pada 7 (tujuh) desa dengan jumlah kelompok 7 buah. Kegiatan ini berupa Adapun Kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan yang mendapat pengawalan dan pembinaan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Kelompok Afinitas Massengereng di Desa Marioritengnga Kecamatan Marioriwawo.
- Kelompok Afinitas Lawara I di Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja.
- Kelompok Afinitas Mappeddie di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata.
- Kelompok Afinitas Tani Nelayan di Kelurahan Kaca Kecamatan Marioriwawa
- Kelompok Afinitas Siporennue di Desa Belo Kecamatan Ganra
- Kelompok Afinitas Samaturue di Desa Labae Kecamatan Citta

Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar **Rp.8,237,500,-** dengan anggaran sebesar **Rp. 8,187,350,-** atau realisasi sekitar **99,39%**.

g. **Pengembangan Lumbung Pangan Desa** berupa Terpenuhinya Sarana Cadangan Pangan Pemerintah sebagai salah satu tempat penyimpanan pangan khususnya padi dalam menghadapi masa paceklik atau musibah bencana alam sebanyak 1 (satu) unit dengan tingkat pencapaian kegiatan sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- o Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah sebanyak 1 (satu) unit di **Desa Enrekeng Kecamatan Ganra** dengan tingkat realisasi fisik **100 %**.

Adapun pagu anggaran kegiatan ini **sebesar Rp.200,922,120,-** dengan anggaran **sebesar Rp. 198,800,000,-** atau realisasi **sekitar 98,94%**.

- h. **Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien** berupa Terlaksananya Pembinaan P-LDPM sebagai salah satu bentuk Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang merupakan kegiatan dana sharing dengan APBN (Dana Dekonsentrasi) dalam bentuk pembinaan, sosialisasi, serta money sevjourh mana perkembangan modal kelompok dan manajemen keuangan. Kegiatan ini di laksanakan di 7 Gapoktan yang beralokasi di Desa Patampanua Kec. Marioriawa, Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo, Desa Timusu Kec. Liliriaja, Desa Lompulle Kec. Ganra dan Desa Ganra Kec. Ganra. Adapun realisasi belanja kegiatan ini sebesar **Rp.9,120,000,-** dengan anggaran sebesar **Rp. 9,120,000,-** atau realisasi **sekitar 100%**.
 - i. **Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan** berupa Terlaksananya Pengujian Sampel Hasil Pertanian yaitu Sayur, Buah dan Ikan, dimana terdapat 11 sampel yang diuji dan hasilnya terdapat 5 sampel yang aman dikonsumsi atau sekitar 45%. Hal tersebut disebabkan adanya indikasi bahan pangan segar yang mengandung zat-zat residu berbahaya terutama kandungan formalin, asam boraks serta pewarna dan pemanis buatan yang dilarang dikonsumsi oleh BPOM. Adapun pagu anggaran kegiatan ini **sebesar Rp. 33,704,500,-** dengan realisasi belanja sebesar **Rp.33,026,000,-** atau realisasi **sekitar 97,99%**
 - j. **Monitoring dan Evaluasi** berupa Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan dan Penyelenggaraan Penyuluhan. Laporan monitoring tersebut berupa laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan capaian kinerja selama 1 Tahun. Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar **Rp.10,495,000,-** dengan anggaran **sebesar Rp. 10,481,700,-** atau realisasi **sekitar 99,87%**.
- 8) **Pencapaian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan** yang dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 47,773,100,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 47,772,800,-** atau realisasi sebesar **100%** yang tingkat pencapaiannya sebagai berikut :
- a. **Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna** berupa terlaksananya kegiatan penyuluhan temu informasi teknologi sesuai spesifik lokasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang diperuntukkan untuk mendukung salah satu program Kementerian Pertanian RI yaitu Upsus (Upaya Khusus) Swasembada Pangan Berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk

menemukenali komoditi spesifik lokasi serta penerapan teknologi yang telah direkomendasikan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian/perkebunan. Kegiatan ini berupa Temu Teknis Kajian Teknologi Tepat guna yang dilaksanakan di 70 desa/kel dengan peserta sebanyak 20 orang. Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar **Rp.47,773,100,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 47,772,800,-** atau realisasi sebesar **100%**.

9) Pencapaian Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan yang dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp.51,089,200,-** dan realisasi belanja sebesar **Rp. 51,089,200,-** atau realisasi sebesar **100%** yang tingkat pencapaiannya sebagai berikut

a. **Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan** berupa terlaksananya kegiatan pendampingan penyuluhan dalam penyusunan RDK/RDKK dan Mattudang-tudangeng di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatnya produksi dan produktivitas padi di lahan petani, meningkatnya kinerja penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan program **Upsus Pajale**. Adapun pagu anggaran sebesar **Rp. 51,089,200,-** dan realisasi belanja sebesar **Rp. 51,089,200,-** atau realisasi sebesar **100%**.

10) Pencapaian Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan yang dilaksanakan dengan 6 (enam) kegiatan yang terdapat pagu anggaran sebesar **Rp. 897,902,800,-** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 893,545,775** atau realisasi sebesar **99,51%** dengan tingkat pencapaiannya sebagai berikut :

a. **Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan** berupa peningkatan SDM penyuluh melalui seminar tentang informasi teknologi penyuluhan yang terbaru, budidaya tanaman, kalender tanam terpadu serta POPT dengan peserta sebanyak 151 orang penyuluh dan THL-TBPP yang dilaksanakan selama 4 (empat) kali. Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar **Rp. 39,374,800,-** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 37,273,875,-** atau realisasi sebesar **94,66%**.

b. **Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan** sebanyak 151 orang, yaitu 111 penyuluh dan 40 THL-TBPP berupa dukungan pembiayaan dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan penyuluh dalam hal ini operasional THL-TBPP selama 2 (dua) bulan, biaya makan minum pertemuan rutin penyuluh di BP3K serta biaya perjalanan

dinas supervise dan monitoring di BP3K. Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar **Rp.73,516,500,-** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 71,916,100,-** atau realisasi sekitar **97,82%**.

- c. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan** berupa Penyusunan Program Penyuluhan dan Rencana Kerja Penyuluhan bagi penyuluh mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan/BP3K dan tingkat kabupaten. Penyusunan program dan RKT ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan rencana kegiatan penyuluhan selama 1 (satu) tahun yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan yang disusun secara tertulis dan sistematis. Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar **Rp.32,978,000,-** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 32,977,900,-** atau realisasi sekitar **100 %**
- d. Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluhan Kecamatan** berupa terlaksananya pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui percontohan/demplot di 8 BP3K. Kegiatan ini difokuskan di BP3K untuk mengembangkan komoditas spesifik lokasi dan selanjutnya dijadikan bahan pembelajaran bagi petani di tingkat kecamatan. Kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan kewirausahaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar **Rp.51,382,500,-** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 51,382,500,-** atau realisasi sekitar 100%.
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluhan** berupatersedianya sarana dan prasarana Pembelajaran bagi penyuluh. Kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian sebanyak 11 jenis sarana alat bantu pembelajaran penyuluh dengan rincian sebagai berikut :
- Pengadaan Mesin Bajak Cultivator sebanyak 3 unit
 - Pengadaan Alat Pendingin Udara/AC sebanyak 8 unit
 - Pengadan Laptop sebanyak 1 unit
 - Pengadaan Meja Kerja sebanyak 1 unit
 - Pengadaan Kursi Kerja sebanyak 1 unit
 - Pengadaan Kursi Rapat sebanyak 80 unit
 - Pengadaan Sofa/Kursi Tamu sebanyak 8 unit
 - Pengadaan Lemari sebanyak 8 unit
 - Pengadaan Proyektor sebanyak 9 unit

- Pengadaan Pagar/Gerbang berupa Pembangunan Pagar Halaman yang dialokasikan di BP3K Kecamatan Donri-Donri.
- Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya berupa Pembangunan Green House sebanyak 3 unit yaitu di BP3K Kec. Lilirilau, BP3K Kec. Donri-Donri dan BP3K Kec. Ganra.

Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar **Rp.571,051,000,-** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 570,971,400,-** atau realisasi sekitar 99,99%

- f. Pengembangan Jaringan Cyber Extension** berupa tersedianya jaringan internet berupa media informasi penyuluhan melalui cyber extension yang dialokasikan di 2 (dua) titik yaitu di BP3K Kec. Marioriawa dan BP3K Kec. Donri-Donri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparat penyuluh dan pelaku utama melalui media informasi penyuluhan. Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar **Rp. 129,600,000,-** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 129,024,000,-** atau realisasi sekitar 99,56%.

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar dapat memberikan gambaran capaian sasaran-sasaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan berikut akan disajikan tabel indikator setiap sasaran strategik. Pencapaian pelaksanaan kinerja pelayanan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Indikator Kinerja dalam IKK dan SPM antara lain :

1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

a. Adanya Regulasi Ketahanan Pangan

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan bagian integral pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan penataan regulasi kebijakan dalam bentuk Perda, Perkada, dsb untuk menjamin kepastian

hukum pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan regulasi dalam mendukung kegiatan Ketahanan Pangan pada Tahun 2015 berupa Peraturan Daerah sebanyak 5 buah dengan target sebanyak 5 buah sehingga tingkat capaian sebesar 100%. Regulasi Ketahanan Pangan yang sifatnya umum sebanyak 4 (empat) buah sedangkan Regulasi Ketahanan Pangan yang sifatnya khusus sebanyak 1 (buah). Adapun Regulasi Ketahanan Pangan dalam mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015;
2. Peraturan Bupati No. 46/PER-BUP/XII/2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015;
4. Peraturan Bupati No. 24/PER-BUP/XII/2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015;
5. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2015;

b. Tersedianya Data Analisis Ketersediaan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan

Ketersediaan Pangan Utama dalam hal ini ketersediaan beras sebagai konsumsi pangan utama penduduk di Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sebesar 130,182 Ton dimana target yang ingin dicapai sebesar 204,391 Ton sehingga tingkat capaian sebesar 63,69%. Untuk memperoleh rata-rata ketersediaan pangan utama penduduk di Kabupaten Soppeng yaitu jumlah ketersediaan pangan utama (130,182) Ton dibagi jumlah penduduk (251.801) jiwa dan selanjutnya di konversi dalam satuan Kg (dikali 1000), sehingga diperoleh rata-rata ketersediaan pangan sebesar 517.00 Kg/Perkapita/Tahun. Untuk mengetahui perbandingan tingkat ketersediaan dan rata-rata ketersediaan pangan utama pada tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10. Jumlah Ketersediaan dan Rata-Rata Ketersediaan Pangan Utama Penduduk di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 dan Tahun 2015.

Uraian	Tahun	
	2014	2015
Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	156.084 Ton/Thn	130,182 Ton/Thn
Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan	621.86 Kg/Perkapita/Thn	517.00 Kg/Perkapita/Thn

Sumber Data Sementara : Laporan Analisis Ketersediaan BP3KP Thn 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 mengalami penurunan jumlah ketersediaan pangan utama di bandingkan pada Tahun 2014 yaitu sebesar 26.702 Ton. Begitupun juga dengan rata-rata ketersediaan pangan utama penduduk mengalami penurunan sebesar 103.2 Kg/Perkapita/Tahun. Penurunan jumlah ketersediaan pangan utama disebabkan oleh adanya penurunan produksi komoditas pangan utama yaitu padi akibat adanya bencana kekeringan (puso) yang dipengaruhi oleh anomali iklim.

2. Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Wajib (Ketahanan Pangan)

- ✓ **Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita** pada Tahun 2015 cukup tinggi dimana pada Tahun 2015 tingkat pencapaian ketersediaan energi dan protein sebesar 356.1% dimana terdapat target sebesar 90% dengan realisasi sebesar 320.47%. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat Ketersediaan Kalori dan Ketersediaan Protein pada Tahun 2011 sampai Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

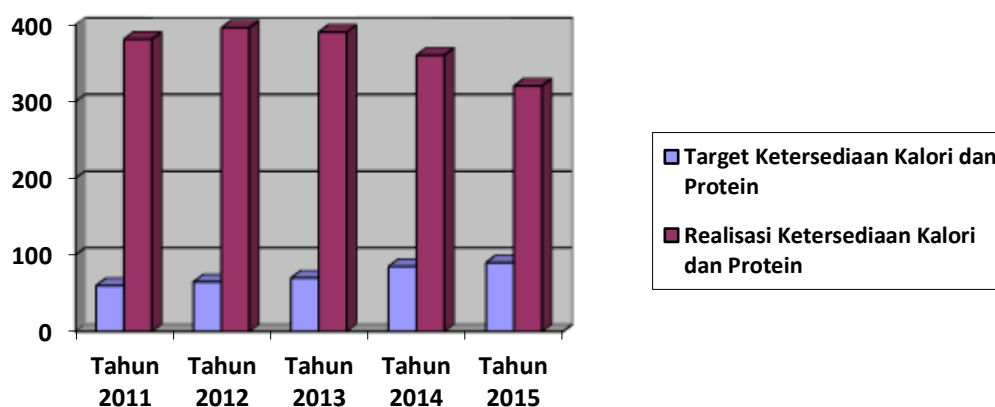
Tabel 11 : Perbandingan Ketersediaan Kalori dan Protein Tahun 2011 s/d Tahun 2015 perkapita/hari

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Ketersediaan Kalori (Kkal/hari)	7.010	7.260	7.211	7,525	6.898
Ketersediaan Protein (Grm/hari)	169.14	172.36	171,91	178.53	186.67

Sumber Data Sementara : Laporan Neraca Bahan Makanan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan kalori dan protein Tahun 2011 sampai Tahun 2014 meningkat, kecuali pada Tahun 2015 mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya penurunan tingkat ketersediaan energi khususnya beras akibat kekeringan. Sedangkan untuk tingkat pencapaian target terhadap realisasi melebihi target karena disebabkan adanya surplus ketersediaan pangan tertentu terhadap konsumsi masyarakat terutama jenis pangan padi-padian. Sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian ketersediaan protein dan kalori perkapita/hari Tahun 2011 s/d Tahun 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

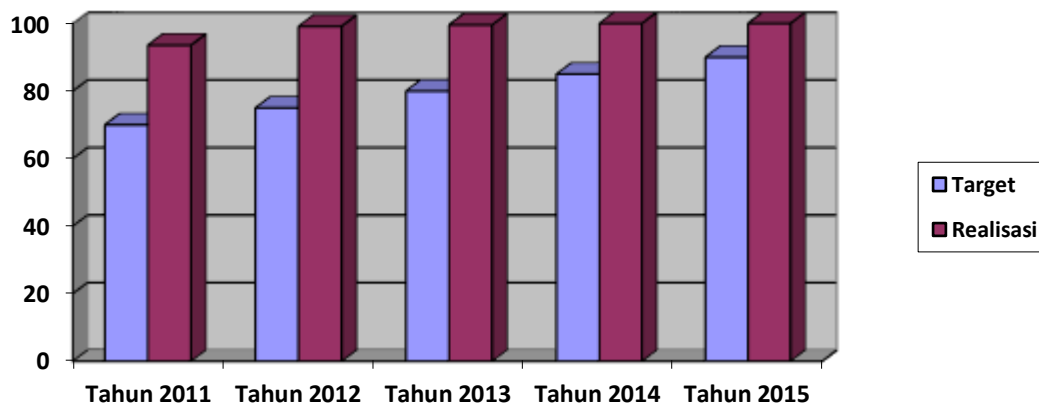
Grafik 6 : Persentase Ketersediaan Kalori dan Energi Perkapita/hari Tahun 2011 s/d Tahun 2015



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2011 target ketersediaan kalori dan protein sebesar 60% dan realisasi 381.53% dengan tingkat pencapaian 635.88%. Pada Tahun 2012 target ketersediaan kalori dan protein sebesar 65% dengan realisasi 396.39% dengan tingkat pencapaian 609.83%. Pada tahun 2013 target ketersediaan kalori dan protein sebesar 70% dan realisasi 390.79% dengan tingkat pencapaian 558.27%. Sedangkan pada Tahun 2014 target 85% dengan realisasi sebesar 360.59% atau pencapaian sebesar 424,22%. Untuk Tahun 2015 target 90% dengan realisasi 320.47% atau tingkat pencapaian 356.1%. Pencapaian realisasi dari Tahun 2011 s/d Tahun 2015 sangat tinggi jika dibandingkan dengan target yang kita tetapkan. Hal ini disebabkan adanya tingkat ketersediaannya pangan utama dalam hal ini beras surplus dimana tingkat produksi dan produktifitas pangan utama padi sangat tinggi.

- ✓ **Penguatan Cadangan Pangan** pada Tahun 2011 s/d Tahun 2014 tingkat pencapaiannya belum terealisasi dimana belum adanya cadangan pangan pemerintah sebesar 100 ton untuk kabupaten/kota. Pada Tahun 2015 terdapat capaian kinerja sebesar 11%, dimana target yang diharapkan sebesar 60% atau sekitar 60 Ton dari target 100 ton untuk kabupaten/kota belum dapat terpenuhi atau terdapat realisasi sebesar 6.6 Ton. Untuk menyikapi hal tersebut maka diharapkan kepedulian pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng untuk mencanangkan pengisian gudang cadangan pangan dapat mencapai 60 Ton pada RPJMD Tahun 2016 - 2021
- ✓ **Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan** pada Tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup baik dimana tingkat ketersediaan 9 (Sembilan) bahan pokok cukup tersedia yaitu: (1) gabah/beras, (2) jagung, (3) kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah dan dapat terjangkau oleh masyarakat di 8 kecamatan. Untuk mengetahui lebih jelas situasi ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 8 : Perbandingan Tingkat Ketersediaan Pasokan Harga dan Akses Pangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2011 sampai Tahun 2015 tingkat ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan mengalami peningkatan dengan tingkat pencapaian melebihi target. Pada Tahun 2011 target 70% dengan realisasi 93.58% dengan tingkat pencapaian sebesar 133%. Tahun 2012 Target 75% dengan realisasi 99.14% dengan tingkat pencapaian sebesar 132%. Tahun 2013 Target 80% dengan

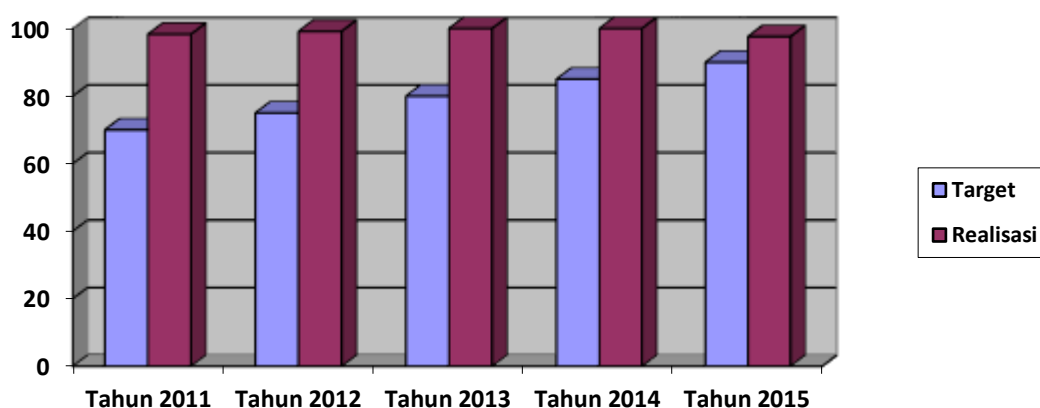
realisasi 99.57% dengan tingkat pencapaian sebesar 124%. Pada Tahun 2014 Target 85% dengan realisasi 100% dengan tingkat pencapaian sebesar 117%. Untuk Tahun 2015 terdapat capaian realisasi sebesar 111.11%, dimana terdapat target 90% dengan realisasi 100%. Indikator ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan mengalami peningkatan capaian disebabkan oleh beberapa faktor variabel perhitungan nilai capaian ketersediaan informasi sesuai target dengan realisasi. Adapun faktor variabel tersebut adalah :

- **Harga** dengan mengacu pada beberapa parameter pembandingan yaitu pertama jenis komoditas terdiri dari 9 (Sembilan) bahan pokok: (1) gabah/beras, (2) jagung, (3) kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah. Kedua lokasi pengambilan sampel dimana di targetkan di 4 (empat) titik yaitu Pasar Sentral Cabenge, Pasar Sentral Takalala, Pasar Sentral Soppeng dan Pasar Sentral Batu-Batu dimana ke 4 (empat) lokasi tersebut telah dilakukan pengambilan sampel sehingga tingkat capaian 100%. Ketiga waktu pengambilan sampel di targetkan 52 minggu dimana waktu pengambilan sampel dilaksanakan sesuai dengan yang di targetkan sehingga tingkat pencapaian sebesar 100%.
- **Pasokan** dengan mengacu pada beberapa parameter pembandingan yaitu pertama jenis komoditas terdiri dari 9 (Sembilan) bahan pokok: (1) gabah/beras, (2) jagung, (3) kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah. Kedua lokasi pengambilan sampel dimana di targetkan di 4 (empat) titik yaitu Pasar Sentral Cabenge, Pasar Sentral Takalala, Pasar Sentral Soppeng dan Pasar Sentral Batu-Batu dimana ke 4 (empat) lokasi tersebut telah dilakukan pengambilan sampel sehingga tingkat capaian 100%. Ketiga waktu pengambilan sampel di targetkan 52 minggu dimana waktu pengambilan sampel dilaksanakan sesuai dengan yang di targetkan sehingga tingkat pencapaian sebesar 100%.
- **Akses** dengan mengacu pada beberapa parameter pembandingan yaitu pertama jenis komoditas terdiri dari 9 (Sembilan) bahan pokok: (1) gabah/beras, (2) jagung, (3) kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah. Kedua lokasi

pengambilan sampel dimana di targetkan di 8 (delapan) titik yaitu di 8 Kecamatan di Kabupaten Soppeng lokasi tersebut telah dilakukan pengambilan sampel sehingga tingkat capaian 100%. Ketiga waktu pengambilan sampel di targetkan 4 minggu dalam satu tahun dimana waktu pengambilan sampel dilaksanakan sesuai dengan yang di targetkan sehingga tingkat pencapaian sebesar 100%.

- ✓ **Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan** yang tingkat pencapaiannya pada 2015 melebihi target yaitu sekitar 108.44% dimana target 90% dengan realisasi 100%. Hal tersebut disebabkan oleh CVKRi (Jumlah Harga Realisasi Rata-Rata Komoditas Pilihan) yang disurvei di Kabupaten Soppeng sebesar 9.80 sedangkan CVKTi (Harga Target Rata-Rata Komoditas Pilihan) yang disurvei di Kabupaten Soppeng sebesar 9.57, sehingga hasil perhitungan Ski (Stabilitas Harga) sebesar 100% dimana harga 9 (sembilan) bahan pokok cukup stabil walaupun sedikit ada lonjakan harga pada bulan-bulan tertentu seperti pada bulan perayaan hari-hari besar keagamaan akan tetapi tidak terlalu berpengaruh besar terhadap akumulasi tiap tahunnya. Adapun Jumlah Komoditas Pilihan sebanyak 9 komoditi antara lain : Beras, Jagung Pipilan, Kedelai, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur Ayam Ras, Minyak Goreng, Gula Pasir dan Cabe Merah. Untuk mengetahui Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Grafik 9 : Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2011 sampai Tahun 2015 tingkat Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan mengalami peningkatan dengan tingkat pencapaian melebihi target . Pada Tahun 2011

target 70% dengan realisasi 98.29% dengan tingkat pencapaian sebesar 140%. Tahun 2012 Target 75% dengan realisasi 99.15% dengan tingkat pencapaian sebesar 132%. Tahun 2013 Target 80% dengan realisasi 100% dengan tingkat pencapaian sebesar 125%. Pada Tahun 2014 Target 85% dengan realisasi 100% dengan tingkat pencapaian sebesar 117. %. Hal ini disebabkan oleh Harga komoditas sembilan bahan pokok cukup terjangkau kecuali harga bawang merah dan cabe mengalami fluktuasi pada hari-hari tertentu

- ✓ **Skor Pola Pangan Harapan** yang telah berhasil dicapai pada Tahun 2015 sebesar 87,65 yang berada di atas target skor PPH yang ditetapkan sebesar 81 dengan capaian tingkat realisasi sebesar 120.22%, dimana target sebesar 90% dan realisasi 108.2%. Kondisi Skor PPH yang melebihi target dikarenakan secara kualitas pola konsumsi di kabupaten Soppeng sudah cukup beragam, bergisi dan berimbang dan sudah mendekati Skor Konsumsi Ideal yaitu Skor 90 pada Tahun 2015. Untuk mengetahui lebih jelasnya, tingkat pencapaian Skor Pola Pangan Harapan selama Tahun 2011 s/d Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah :

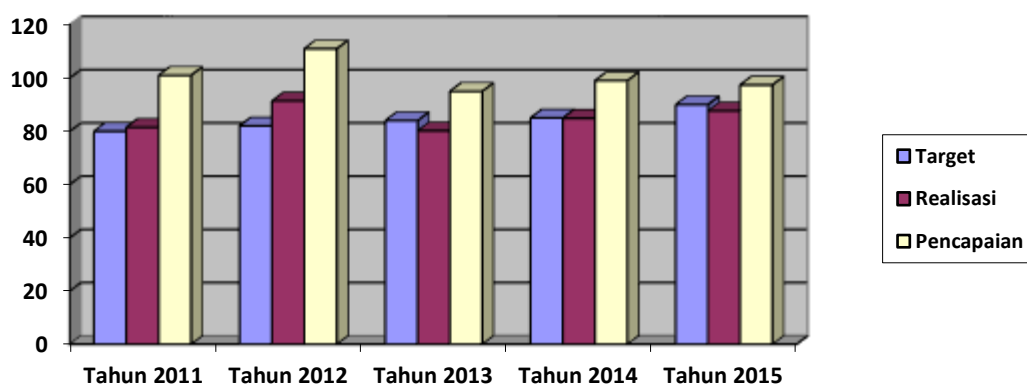
Tabel 15 : Perbandingan Skor PPH Tahun 2011 s.d Tahun 2015

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH Ideal	Skor Pola Pangan Harapan				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi-Padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi-Umbian	2,5	0,60	2,0	0,6	0,8	1,2
3.	Pangan Hewani	24,0	17,5	19,5	16,3	18,2	19,2
4.	Minyak dan	5,0	3,2	3,9	5,0	4,1	4,3
5.	Lemak						
6.	Buah/Biji	1,0	0,7	0,7	0,9	0,6	0,8
7.	Kacang-Kacangan	10,0	9,5	8,4	4,4	4,2	5,2
8.	Gula	2,5	2,5	1,9	1,7	1,9	2,1
9.	Sayur dan Buah	30,0	22,5	30,0	26,4	30,0	30,0
	Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah		100	81,5	91,4	80,2	84,9	87,65

Berdasarkan tabel diatas bahwa Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Soppeng cukup bervariasi dan mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Pola konsumsi masyarakat di kabupaten soppeng sudah cukup beragam dan berimbang dengan adanya program pemerintah pusat dan daerah berupa diversifikasi pangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
- Adanya penurunan konsumsi padi-padian berupa beras tiap tahunnya dimana pada tahun 2015 tingkat konsumsi beras di Kabupaten Soppeng sebesar 998 kkal/Kap/Hari

Grafik 10 : Perbandingan Tingkat Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2011 s/d Tahun 2015

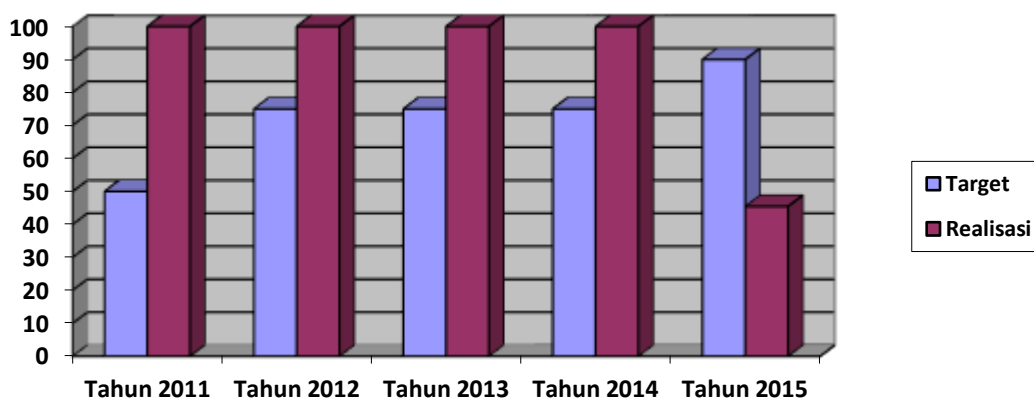


Berdasarkan grafik diatas, pada Tahun 2011 tingkat pencapaian Skor PPH sangat tinggi sebesar 101% dimana target 80 dan realisasi 81,5. Begitupun pada Tahun 2012 tingkat pencapaian lebih tinggi sebesar 111% dimana realisasi lebih besar dari pada target (target 82 dan realisasi 91,4). Pada Tahun 2013 target Skor PPH sebesar 84 namun hasil perhitungan PPH sebesar 80,2. Untuk Tahun 2014 target PPH 85 dan hasil perhitungan 84,9 dengan tingkat pencapaian 99,8. Pada Tahun 2015 tingkat capaian sebesar 97,39% dengan target skor PPH 90 dan realisasi skor PPH 87,65. Adanya peningkatan skor PPH pada Tahun 2015 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan kita di Kabupaten Soppeng sudah mendekati Skor PPH Ideal yang telah ditetapkan oleh SUSENAS yaitu 90.

- ✓ **Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan** yang telah dilakukan pada Tahun 2011 s/d Tahun 2015 di 8 Kecamatan cukup bervariasi, dimana pada Tahun 2015 tingkat capaian sebesar 50,50%, dimana target yang ingin dicapai

sebesar 90% dengan realisasi 45,45%. Pencapaian tersebut berupa hasil pengujian dilaboratorium terdapat jumlah pangan yang diuji adalah 11 sampel dengan hasil pengujian yang aman dikonsumsi sebanyak 5 sampel. Hal ini menunjukkan bahwa sebahagian besar buah-buahan di Kabupaten Soppeng mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan terutama formalin. Untuk mengetahui perbandingan capaian kinerjanya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 11 : Perbandingan Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015



Berdasarkan grafik diatas, pada Tahun 2011 tingkat pencapaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 200% dengan target 50% dan realisasi 100% dimana jumlah sampel buah yang diuji masing-masing sebanyak 3 jenis sayur dan buah dan jumlah sampel yang aman atau hasil pengujian oleh Tim dari BKPD Prov. Sul-Sel menunjukkan bahwa semua sampel tersebut aman untuk dikonsumsi sehingga pencapaiannya sebesar 100%. Pada Tahun 2012, 2013 dan 2014 tingkat pencapaian sebesar 133% dimana target 75% dan realisasi 100% dimana jumlah sampel buah dan sayur yang diuji masing-masing sebanyak 4 jenis sampel. Untuk Tahun 2015 tingkat pencapaian sebesar 50,50% dengan target 90% dan realisasi 45,45%, dimana kondisi ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Tim penguji menunjukkan bahwa jenis sampel yang diuji belum aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Soppeng terutama beberapa jenis buah-buahan seperti buah apel, buah anggur dan ikan kering yang dijual di pasar tradisional ataupun di supermarket (alfamart, alfamidi, indomart) di Kabupaten Soppeng yang diduga mengandung zat pengawet atau formalin.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng berupa kondisi eksternal dan internal. Adapun isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi berupa kondisi eksternal sebagai berikut:

a. **Faktor SDM disektor Pertanian baik para Penyuluh mau pun Pelaku Utama/Pelaku Agribisnis lainnya:**

- Kapasitas dan kemampuan Penyuluh belum optimal.
- Jumlah Penyuluh belum mencukupi untuk mendukung satu desa satu penyuluh.
- Jumlah KJF Kabupaten sebagai widyaswara dan instruktur belum memadai.
- Pola perilaku berusaha tani dan berorganisasi/ berkelompok sebagian besar Petani (Pelaku Utama) masih bersifat tradisional, relatif rendah dan belum berorientasi Agribisnis.
- Terbatasnya akses Pelaku Agribisnis terutama Pelaku Utama kepada Lembaga Keuangan dalam mendukung permodalan, teknologi dan informasi pasar.

b. **Faktor Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan:**

- Pembenahan Kelompok Tani, terutama validitas Data Kelompok Tani belum optimal, sedangkan program-program kegiatan memerlukan validitas data yang baik.
- Keberadaan Gapoktan umumnya belum terintegrasi luas.
- Posisi tawar kelembagaan petani masih lemah.
- Posluhtan belum diberdayakan sebagai pusat penyebaran informasi/teknologi pertanian di desa.
- Keberadaan UPT.BP3K belum dimanfaatkan secara optimal karena belum tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penyuluhan dan kelengkapan kantor lainnya, terutama alat peraga penyuluhan yang cukup minim.
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No.16 Tahun 2006.
- Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan belum optimal.

c. Faktor Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan:

- Pembinaan Kelompok Tani, terutama validitas Data Kelompok Tani belum optimal, sedangkan program-program kegiatan memerlukan validitas data yang baik.
- Keberadaan Gapoktan umumnya belum terintegrasi luas.
- Posisi tawar kelembagaan petani masih lemah.
- Posluhan belum diberdayakan sebagai pusat penyebaran informasi/teknologi pertanian di desa.
- Keberadaan UPT.BP3K belum dimanfaatkan secara optimal karena belum tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penyuluhan dan kelengkapan kantor lainnya, terutama alat peraga penyuluhan yang cukup minim.
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No.16 Tahun 2006.
- Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan belum optimal.

d. Faktor ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta aspek kelembagaan Ketahanan Pangan antara lain :

- Laju peningkatan kebutuhan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan laju peningkatan produksi.
- Cadangan pangan daerah yang belum memadai.
- Masih terjadinya fluktuasi harga beberapa komoditas tertentu yang disebabkan bahan mentahnya tidak diproduksi sepanjang waktu.
- Sulitnya mendata arus keluar-masuk bahan pangan antar daerah.
- Masih tingginya tingkat konsumsi pangan beras per kapita/tahun yang disebabkan tingkat keragaman/diversifikasi konsumsi pangan belum berimbang dan masih didominasi oleh beras

e. Faktor Pelaksanaan Program/Kegiatan antara lain:

- Umumnya pelaksanaan program-program sektor pertanian (daerah dan nasional) masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dan terlaksana secara berkesinambungan.
- Umumnya perencanaan program belum bersifat *bottom-up* akibat masih rendahnya partisipasi masyarakat lapisan bawah (*grass root*) dalam perencanaan dan rendahnya kualitas penyuluh dalam menyusun

perencanaan yang partisipatif sesuai dengan kebutuhan.

- Masih rendahnya daya dukung teknologi dan informasi dalam penentuan komoditi unggulan setempat.
- Masih minimnya anggaran yang tersedia sehingga pencapaian tujuan dan sasaran penyuluhan juga masih rendah.

Dalam upaya memecahkan beberapa permasalahan terkait adanya isu-isu penting tersebut maka ada beberapa langkah-langkah yang ditempuh oleh BP3KP Kab. Soppeng antaralain :

1. Intensifikasi sosialisasi, koordinasi, penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) kepada Masyarakat, kelompok dan aparaturnya.
2. Melaksanakan bimbingan teknis percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan bagi masyarakat dan kelompok wanita tani binaan BP3KP Kab. Soppeng.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dan bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Soppeng.
4. Melaksanakan pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga menjelang hari raya keagamaan.
5. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan apresiasi pengawasan keamanan pangan kepada pelaku usaha pertanian dan aparaturnya.
6. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis bagi kelompok tani, wanita tani dan gapoktan secara berkesinambungan
7. Peningkatan pola pikir dan perilaku peternak dari subsistem tradisional menjadi peternak modern berwawasan global.
8. Meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pemantapan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait
9. Penempatan satu penyuluh satu desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Perbandingan antararancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di BP3KP Kab. Soppeng meliputi peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani serta pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, Programnya yaitu Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan, program-

program ini dilaksanakan oleh BP3KP Kab. Soppeng meliputi 2 (dua) urusan yaitu urusan wajib ketahanan pangan dan Urusan Pilihan Pertanian. Adapun revidari kedua urusan tersebut yaitu:

a. Urusan ketahanan pangan yang ingin dicapai.

- Meningkatkan ketersediaan pangan utama atau surplus sebesar 5% per tahun (116.715 Ton pada Tahun 2017)
- Meningkatkan produksi beras (194.971 Ton pada Tahun 2017)
- Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (93 pada Tahun 2017) .
- Meningkatkan ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (92% Tahun 2017).
- Meningkatkan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (24 Ton Tahun 2017)
- Meningkatkan Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan (93% Tahun 2017)
- Meningkatkan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (93% Tahun 2017)
- Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (65% Tahun 2017)
- Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan (100% Tahun 2017)

b. Urusan Pertanian yang ingin dicapai

- Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani (82% Tahun 2017)
- Meningkatkan Kelembagaan Petani yang Mandiri (30% Tahun 2017)
- Meningkatkan Cakupan Kelompok Tani yang dibina (89,93% Tahun 2017)
- Meningkatkan Kelembagaan Penyuluhan yang diberdayakan melalui Intergrasi Terpadu (82% Tahun 2017)
- Meningkatkan Penyelenggaraan Penyuluhan yang Efektif melalui Evaluasi Kinerja Mandiri Penyuluh (82%)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengedepankan sistem perencanaan partisipatif dan bottom-up dari seluruh lapisan masyarakat yang terintegrasi secara timbal balik. Olehnya itu sarana pelaksanaan musrembang merupakan wadah proses perencanaan dalam mengapresiasi semua kegiatan masyarakat yang tersusun dalam rancangan musrembang berdasarkan skala

prioritas. Dalam penyusunan Rencana Kerja BP3KP Kab. Soppeng selalu berorientasi pada usulan skala prioritas musrembang dan mengacu pada Renstra BP3KP Kab. Soppeng Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam Dokumen RKPD Kab. Soppeng.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Ketahanan Pangan

3.1.1. Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perenanaan pembangunan nasional yang mengedepankan sistem perencanaan partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat yang terintegrasi secara timbal balik antara pusat dan daerah dan antara daerah dan pusat. Selanjutnya bahwa dengan dibarengi semangat otonomi daerah dengan pola desentralisasinya dimana kewenangan sebagian besar dilimpahkan ke pemerintah daerah untuk mengurus dirinya sendiri tanpa mengesampingkan kepentingan pemerintah pusat di daerah sebagai perwujudan bentuk negara kesatuan RI.

Sehingga dengan pertimbangan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus terintegrasi dengan RPJP/RPJM Propinsi dan Pusat.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian RI adalah sebagai berikut :

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015 – 2019 yang dijabarkan dalam **Sasaran Strategis yang ingin dicapai Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019** sebagai berikut:

1. Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai serta Peningkatan Produksi Daging dan Gula
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan
3. Peningkatan Komoditas Bernilai Tambah, Berdaya Saing dalam memenuhi Pasar Ekspor dan Substitusi Impor
4. Penyediaan Bahan Baku Bioindustri dan bioenergi
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian

6. Pengembangan dan penguatan bio industry dan bio energi
7. Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani

Sasaran strategis tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan berkelanjutan. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis beberapa Kementerian tersebut, maka faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari keberhasilan pelayanan BP3KP Kab. Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16 : Permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng berdasarkan Renstra Kementerian beserta Faktor yang mempengaruhi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai serta Peningkatan Produksi Daging dan Gula	Menurunnya Ketersediaan (Surplus Beras)	Adanya Anomali Iklim	Dukungan Kebijakan Pemerintah Dukungan Inovasi/Rekayasa Teknologi
		Alih Fungsi lahan	Regulasi Pengelolaan Lahan Belum Optimal	Upaya pengendalianalihfung silahan melalui penyusunan dan penerapan peran gkat peraturan perundangan
2	Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani	Lemahnya Kelembagaan Petani	SDM Pelaku Utama masih Rendah (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap)	Dukungan Kebijakan Pemerintah Dukungan Permodalan melalui Kemitraan
3	Peningkatan Diversifikasi Pangan	Pola Pangan Harapan belum terpenuhi	Pola Diversifikasi Pangan Belum Maksimal dan Pola Pikir Masyarakat tentang Pola Konsumsi yang Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman masih Mini	Dukungan Kebijakan Pemerintah Tentang Percepatan Diversifikasi Pangan Pembinaan dan Sosialisasi Pola Diversifikasi Pangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng

1. Tujuan dari Rencana Kerja yaitu:

a. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Ideal

Strategi :

- Peningkatan koordinasi dan strategi dalam penanganan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
- Percepatan pengenaan konsumsi pangan.
- Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (Desa mandiri Pangan, Lumbung Pangan Masyarakat, Lembaga Distribusi pangan).

2. Sasaran dari Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kecukupan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat;
2. Makin baiknya pola pangan harapan masyarakat Kabupaten Soppeng;
3. Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat;
4. Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
5. Meningkatnya usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan di pedesaan.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017

Adapun rincian program dan kegiatan menyangkut indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana pada Rencana Kerja Tahun 2017 sebagai berikut:

No	PROGRAM	Kelompok Sasaran	Lokasi	Dana Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan			1.122.806.500,-	DAU
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		BBI Ompo, BBI Lajoa, BBI Citta, Mess Ompo, Kel. Limpomajang, Kel. Kaca	54.380.000,-	
	Pemetaan Daerah rawan pangan		Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	29.052.500,-	

Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan		Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	71.512.500,-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas		Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	13.748.590,-	
Koordinasi Kebijakan Perberasan		8 Kecamatan	59.150.000,-	
Pengembangan Desa Mandiri Pangan		Desa congko, Kel. Tettingkenrarae, Desa WatuToa, Desa Barae, Desa Goarie	38.150.000,-	
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor		Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	15.000.000,-	
Pengembangan Cadangan pangan daerah		Desa Enrekeng Kec. Ganra	95.000.000,-	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor		Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	3.919.000,-	
Pengembangan Lumbung Pangan Desa		Desa Pattojo, Desa Marioriaja	100.000.000,-	
Penyediaan peralatan rumah tangga		Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	5.000.000,-	
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat		Kel. Tettikenrarae, Desa jampu, Kel. Cabbenge, Kel. Lapajung, Desa donri donri, Kel. Manorang salo, Desa ganra, Desa Citta	22.450.000,-	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan		Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	8.540.000,-	
Pengembangan model distribusi pangan		Desa Mariorilau, Desa Lompulle, Desa Patampanua, Desa Ganra, Kel. Lemba, Desa Timusu, Desa Citta, Desa Tottong	66.675.000,-	
Penyediaan bahan logistik kantor		Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	1.320.000,-	

	Pemantuan dan harga pangan pokok	Kel. Tettikenrarae, Desa Jampu, Kel. Cabbenge, Kel. Lapajung, Desa Donri donri, Kel. Manorangsallo, Desa Ganra, Desa Citta	29.325.000,-	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	261.108.910,-	
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	198.210.000,-	
2.	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan pangan		567.795.000,-	DAU
	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	8 Kecamatan	34.770.000,-	
	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui P2KP	Goarie, laringgi, Mattiro Deceng, Gattareng Toa, Gattareng, Baringeng	66.435.000,-	
	Promosi dan sosialisasi produk olahan pangan lokal	8 Kecamatan	54.730.000,-	
	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	8 Kecamatan	46.660.000,-	
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng	61.970.000,-	
	Pembinaan dan pemantauan dan sosialisasi preferensi pangan masyarakat	8 Kecamatan	43.210.000,-	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng	22.620.000,-	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng	60.000.000,-	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng	31.900.000,-	
3.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur		30.500.000,-	DAU
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng	30.500.000,-	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		39.320.000,-	DAU

	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng	17.030.000,-	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng	8.490.000,-	
	Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng	13.800.000,-	
5.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap		2.450.986.000,-	DAU
	Pengembangan perikanan (Bibit Ikan Unggul Air tawar)	Kec. Lalabata, Kec. Liliriaja, Kec. Citta	196.865.000,-	
	Pengadaan sarana dan prasarana pengembangan perikanan (DAK)	Kec. Marioriawa, Kec. Lalabata, Kec. Liliriaja, Kec. Citta	1.808.521.000,-	
	Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB) dan pengelolaan pemasaran hasil perikanan (PUMP-PPHP)	Kel. Ompo Kec. Lalabata	18.850.000,-	
	Pembinaan dan pengawasan danau tempe	Kec. Marioriawa, Kec. Donri Donri, Kec. Ganra	359.850.000,-	
	Pengukuran luasan lahan tappareng salae	Kec. Ganra	66.900.000,-	
6.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		99.280.000,-	DAU
	Pengembangan Agribisnis perikanan	Kec. Lalabatarilau, Kec. lalabata	80.500.000,-	
	Pengembangan daya saing produk perikanan	Kec. Lalabatarilau	18.780.000,-	

BAB IV

P E N U T U P

A. Kaidah Pelaksanaan

1. Metode Pelaksanaan

➤ Pola Penyelenggaraan

- Pencapaian Sasaran Renja 2017 ditetapkan 2 (dua) Program yang mengakomodir Urusan Wajib (Ketahanan Pangan), 2 (dua) program yang mengakomodir Urusan Pilihan (Pertanian) dan 4 (empat) Program Penunjang (Rutin)
- Upaya pencapaian Sasaran Renja 2017 melalui kegiatan strategis yang penerapannya melalui berbagai kegiatan dengan pembiayaannya oleh pemerintah dan masyarakat/swasta.

➤ Organisasi Pelaksanaan

Efektifitas Penyelenggaraan Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun dalam bentuk struktur organisasi dan kelembagaan sesuai Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 31/PER-BUP/IX/2008, tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng.

➤ Sumber Pembiayaan

Sumber dana untuk pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 berasal dari sumber-sumber pembiayaan APBD, APBN, dan tidak menutup kemungkinan dana partisipasi dari pihak ke tiga sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan Evaluasi Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dilaksanakan sesuai jenjang struktural yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan tertub dan obyektif serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas (AKIP dan LAKIP).
- Evaluasi umum pelaksanaan Renja dilaksanakan pada akhir periode sebagai evaluasi resmi kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dan sebagai acuan dalam persiapan/penyusunan Renja selanjutnya.

3. Arahan Pelaksanaan

- Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai tolok ukur kegiatan dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Soppeng Kab. Soppeng Tahun 2016-2021
- Penjabaran Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 merupakan satu bagian yang utuh dengan Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 – 2021.
- Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 bersifat fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi obyektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan kebutuhan strategis yang urgen.
- Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng

B. Penutup

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng kami susun secara obyektif untuk menjadi acuan dalam pembangunan ketahanan pangan yang dinamis dan berkelanjutan serta revitalisasi penyelenggaraan penyuluhan yang efektif.

